DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA TAHUN 2018

PENGANTAR

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang menyebutkan bahwa Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kewajiban bagi setiap daerah untuk mengembangkan kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan di daerah, guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, perangkat daerah berkewajiban menyiapkan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD Provinsi Banten serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian maka Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam menyusun program kegiatan tahunan disertai pagu indikatif sesuai kewenangannya.

Serang, Mei 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198803 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
1.1. Latar Belakang 1.2
1.2. Landasan Hukum 1.3
1.3. Maksud dan Tujuan 1.5
1.4. Sistematika Penulisan 1.5
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa serta Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2016 ..... 2.2
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 ..... 2.28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 2.32
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN 3.1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja 3.2
3.2. Program dan Kegiatan 3.3
BAB 4 PENUTUP 4.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan IPG Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten	2.9
Tabel 2.2	IDG Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2015 ..	2.11
Tabel 2.3	Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016	2.15
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	2.31
Tabel 2.5	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan	2.32
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018	3.8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan IPG Banten terhadap IPG Nasional Tahun 2015 …..	2.9
Grafik 2.2	Persandingan Capaian IPG Provinsi Banten dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional ……..	2.10
Grafik 2.3	IDG Provinsi Banten 2011-2013 berbanding Nasional ……	2.10
Grafik 2.4	IDG Provinsi Banten dan Provinsi Sekitar 2014 ……	2.12
Grafik 2.5	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Usia >18 Tahun Tahun 2013 – 2016 ……..	2.13
Grafik 2.6	Kasus Kekerasan Terhadap Anak Usia 0 - 17 Tahun Tahun 2012 – 2016 ……..	2.13
Grafik 2.7	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Tahun 2013 – 2016 ……..	2.14
Grafik 2.8	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Serang …….. …	2.15
Grafik 2.9	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak …….. …	2.16
Grafik 2.10	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Serang ...	2.16
Grafik 2.11	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Cilegon ..	2.17
Grafik 2.12	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pandeglang ……	2.17
Grafik 2.13	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang ……	2.18
Grafik 2.14	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang …….. ..	2.18
Grafik 2.15	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Selatan ……..	2.19
Grafik 2.16	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Banten …… .	2.19

Grafik 2.17 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el 2.21
Grafik 2.18 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 2.21
Grafik 2.19 Jumlah Penduduk yang Belum Kawin 2.22
Grafik 2.20 Jumlah Penduduk yang Sudah Kawin 2.22
Grafik 2.21 Jumlah Penduduk yang Cerai Mati 2.23
Grafik 2.22 Jumlah Penduduk yang Cerai Hidup 2.23
Grafik 2.23 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 2.24

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN
NOMOR :

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten sebagai bahan dalam bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Perangkat Daerah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bahan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Agustus 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITI MA'ANI NINA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198803 2 003

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam rencana program kegiatan dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yang ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten menyusun RENJA Tahun 2018 sebagai wujud pelaksanaan tahun pertama dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang telah diintegrasikan dengan prioritas Rancangan RKPD Tahun 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dengan harapan dapat meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2018 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa serta Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2016
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2018
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB 5 PENUTUP

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA SERTA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT PROVINSI BANTEN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang semula menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula menjadi bagian pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengalami *reorganiasasi* dan digabungkan kedalam perangkat daerah berbentuk dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;

4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;

20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 juga memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk kepada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Provinsi Banten periode tahun 2012-2017, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan melalui strategi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2012-2017, meliputi :

1. Strategi Perkuatan Perekonomian Daerah;
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Strategi Revitalisasi Kawasan dan wilayah

Adapun kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dilaksanakan melalui:

1. Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efesien
2. Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan adminstrasi

Capaian kinerja pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 melalui : (1) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, (2) Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta (3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

berdasarkan pengukuran kinerja yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya adalah sebagi berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, capaian kinerja SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten pada tahun 2012-2017, sebagai berikut :

a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 20% dari target tahunan sebesar 20% atau Rasio Capaian sebesar 100% serta pada periode tahun 2014 terealisasi 20% dari target tahunan sebesar 20% atau Rasio Capaian sebesar 100%

b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Pada tahun 2013 dan 2014 tidak terdapat realisasi capaian terhadap target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 20%.

c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 9.18% dari target tahunan sebesar 15% atau Rasio Capaian sebesar 61.20% serta pada periode tahun 2014 terealisasi sebesar 5.63% dari target tahunan sebesar 15% atau Rasio Capaian sebesar 37.53%.

d. **Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu**

Pada tahun 2013 dan 2014 terealisasi sebesar 15% dari target tahunan sebesar 15% atau Rasio Capaian sebesar 100%

e. **Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 13.40% dari target tahunan sebesar 16% atau Rasio Capaian sebesar 83.75% serta pada periode tahun 2014 terealisasi sebesar 12.08% dari target tahunan sebesar 16% atau Rasio Capaian sebesar 75.50%.

f. **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 9.81% dari target tahunan sebesar 10% atau Rasio Capaian sebesar 98.10% serta pada periode tahun 2014 terealisasi sebesar 12.08% dari target tahunan sebesar 10% atau Rasio Capaian sebesar 120.80%.

g. **Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**

Pada tahun 2013 dan 2014 terealisasi sebesar 10% dari target tahunan sebesar 10% atau Rasio Capaian sebesar 100%

h. **Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**

Pada tahun 2013 dan 2014 terealisasi sebesar 20% dari target tahunan sebesar 20% atau Rasio Capaian sebesar 100%

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tidak dapat dilakukan pengukuran secara rinci berkenaan dengan tidak terdapatnya target kinerja tahunan dalam Renstra Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten dan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Adapun Indikator Kinerja Kunci yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, meliputi :

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
b. Persentase jumlah angkatan kerja dibawah umur
c. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan dan anak dari tindakan kekerasan
d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
e. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
f. Persentase Angkatan Kerja Perempuan
g. Persentase Penduduk berKTP per satuan penduduk (>17 Tahun)
h. Persentase Bayi Berakte Kelahiran
i. Persentase Pasangan Berakte Nikah
j. Kepemilikan KTP
k. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk
l. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
m. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Pencapaian indikator-indikator tersebut diatas tidak terlepas pula dari dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten terlihat bahwa rencana anggaran selama 5 tahun yang mencapai Rp. 45.790.000.000 terealisasi sebesar Rp. 46.283.530.939 atau 108.16%.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD, Persentase perempuan di lembaga legislatif, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.

Grafik 2.1
Perbandingan IPG Banten terhadap IPG Nasional
Tahun 2015

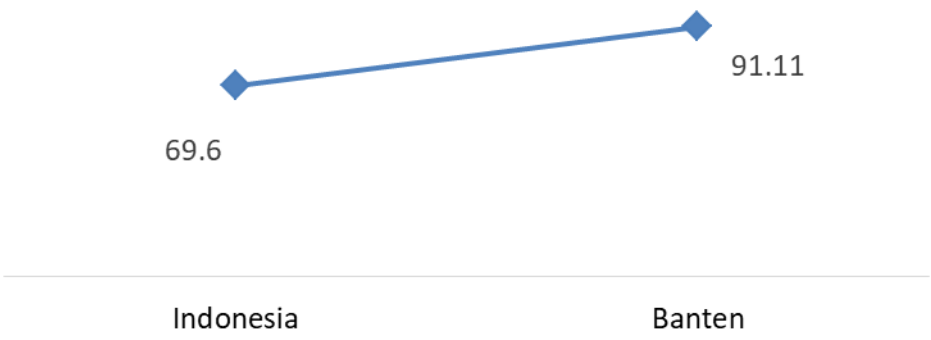

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas, IPG Provinsi Banten menunjukan lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Namun diharapkan dari angka penyesuaian IPG, angka IPG Provinsi Banten terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tabel 2.1
Perbandingan IPG Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pandeglang	75,94	77,66	80,82	83,42	85,84	85,88
2	Lebak	71,13	72,98	75,72	77,17	77,86	77,8
3	Tangerang	90,22	90,24	90,53	90,62	91,11	90,72
4	Serang	88,91	89,25	89,54	90,26	91,78	91,77
5	Kota Tangerang	93,48	93,55	93,64	93,77	93,9	94,03
6	Kota Cilegon	85,08	85,25	85,4	86,14	86,75	86,64
7	Kota Serang	89,66	90,94	91,11	91,28	91,29	91,4
8	Kota Tangerang Selatan	...	92,09	92,9	93,04	93,13	93,14
9	**BANTEN**	**90,22**	**90,22**	**90,28**	**90,31**	**90,99**	**91,11**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat dari Tabel 2.1 di atas menunjukan bahwa capaian IPG kabupaten/kota Di Provinsi Banten menunjukan terdapat kesenjangan antar Daerah Utara dan Selatan dari sisi geografis Banten. Kota Tangerang merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Pandeglang capaian IPGnya rendah.

Grafik 2.2
Persandingan Capaian IPG Provinsi Banten dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional.

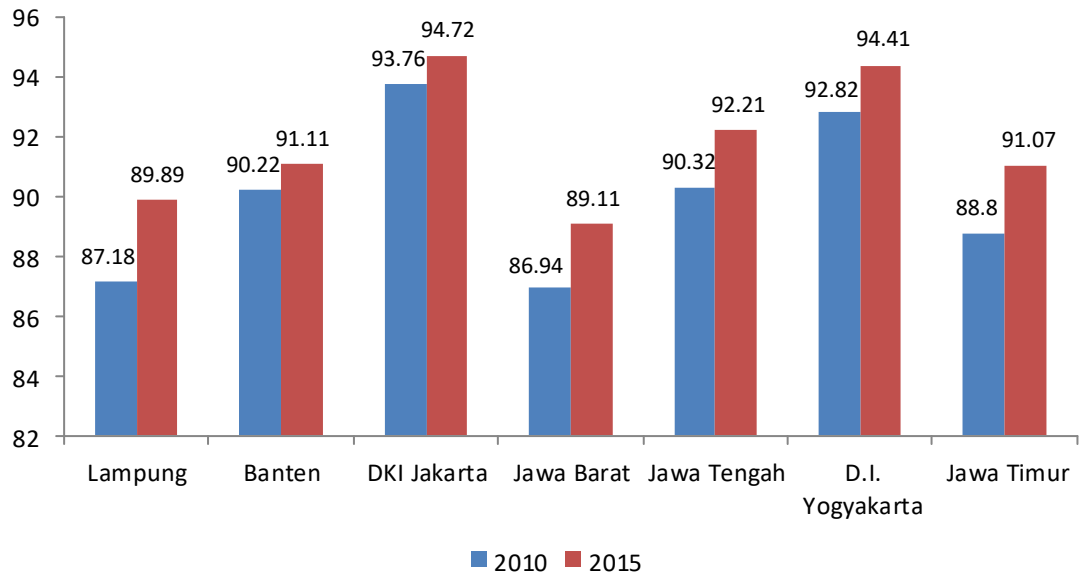

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan Grafik 2.2 di atas maka Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa menunjukan capaian Provinsi Banten sedikit lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat walaupun tertinggal dari Provinsi Lain di Pulau Jawa dan Lampung.

Grafik 2.3
IDG Provinsi Banten 2011-2013 berbanding Nasional

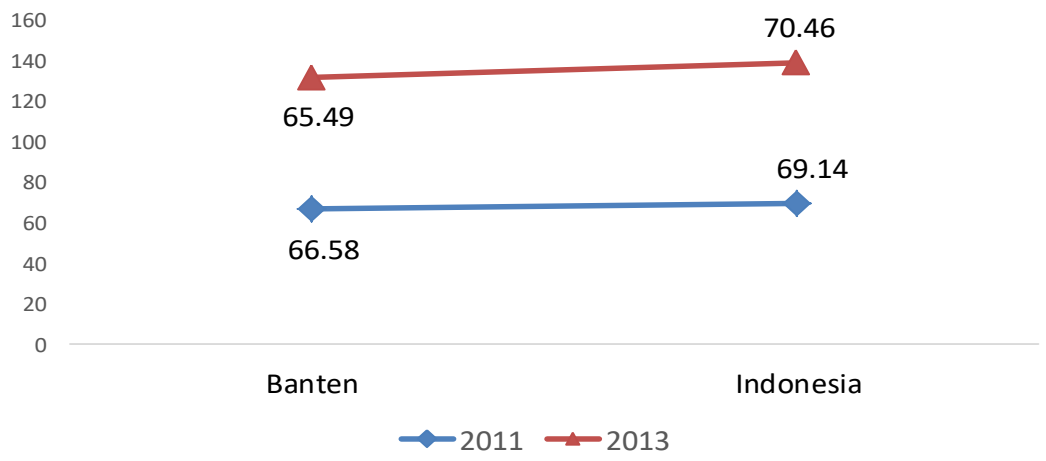

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan Grafik 2.3 di atas maka Jika diperbandingkan dengan Nasional Menunjukan capaian Banten dibawah IDG Nasional. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Banten pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat masih sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, maka kesenjangan antar kabupaten/kota merata. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki angka dibawah 60. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen.

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
IDG Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
Tahun 2012 - 2015

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
		2012	2013	2014	2015
1	Pandeglang	59,65	60,2	57,98	61,47
2	Lebak	63,09	60,48	63,81	62,27
3	Tangerang	55,41	53,16	61,67	62,54
4	Serang	54,21	53,72	61,94	58,32
5	Kota Tangerang	64,6	65,3	71,4	69,16
6	Kota Cilegon	55,16	54,24	55,8	52,66
7	Kota Serang	63,5	63,88	61,83	62,88
8	Kota Tangerang Selatan	59,94	60,3	65,89	63,17
9	BANTEN	65,53	65,49	66,91	67,94

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan provinsi sekitar Banten, maka nampak posisi Provinsi Banten berada dibawah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. IDG Provinsi Banten melampuai capaian IDG Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
IDG Provinsi Banten dan Provinsi Sekitar 2014

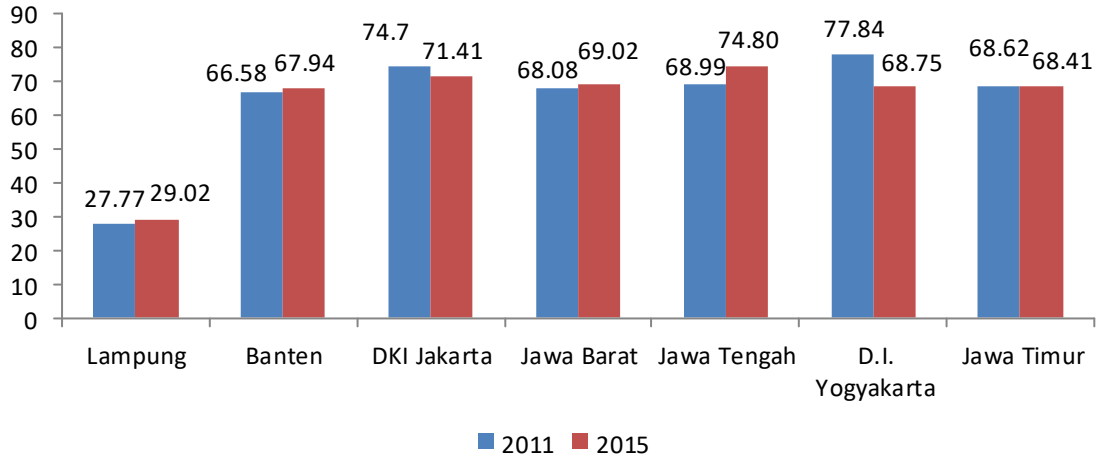

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pencapaian Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilihat dari indikator utama yaitu Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Persentase Perempuan Korban Perdagangan Orang dan Persentase Anak Korban Kekerasan.

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Banten kurun waktu tahun 2013 – 2016 cenderung meningkat, hal ini berdasarkan data pada tahun 2013 kasus terhadap perempuan usia lebih dari 18 tahun sebanyak 122 kasus meningkat sebesar 164% pada tahun 2015.

Grafik 2.5
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Usia >18 Tahun
Tahun 2013 - 2016

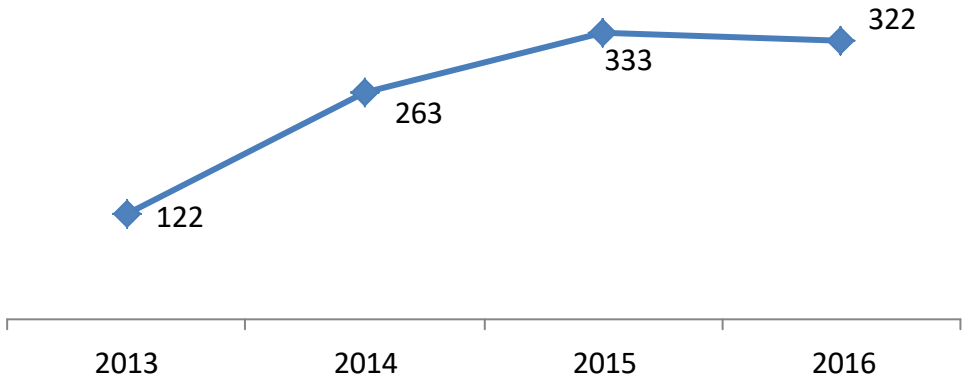

Sumber : Laporan Semester Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Banten, 2015, data diolah

Demikian pula halnya dengan Persentase Anak Korban Kekerasan di Provinsi Banten menunjukan angka yang cenderung meningkat untuk Anak Perempuan sebesar 92.61 % dari kasus yang terjadi di tahun 2013 sebanyak 176 kasus sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.6 berikut.

Grafik 2.6
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Usia 0 - 17 Tahun
Tahun 2012 - 2016

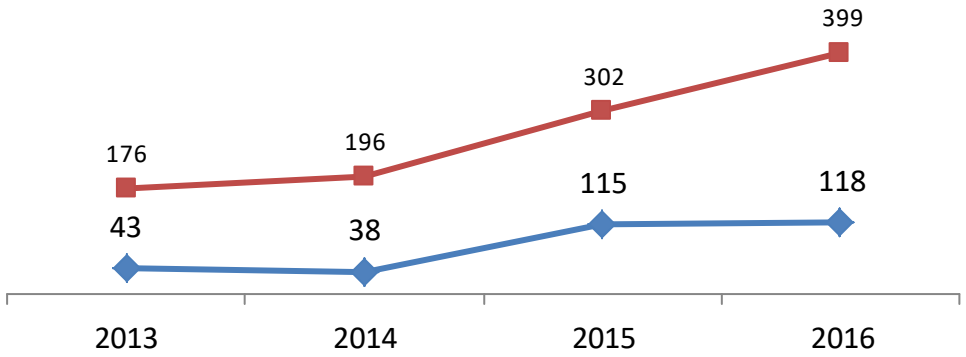

Sumber : Laporan Semester Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Banten, 2015, data diolah

Berkenaan dengan banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan tahun 2013 sebanyak 259 kasus mengalami penurunan kasus di tahun 2016 sebanyak 250 kasus sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.7 berikut :

Grafik 2.7
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan
Tahun 2013 - 2016

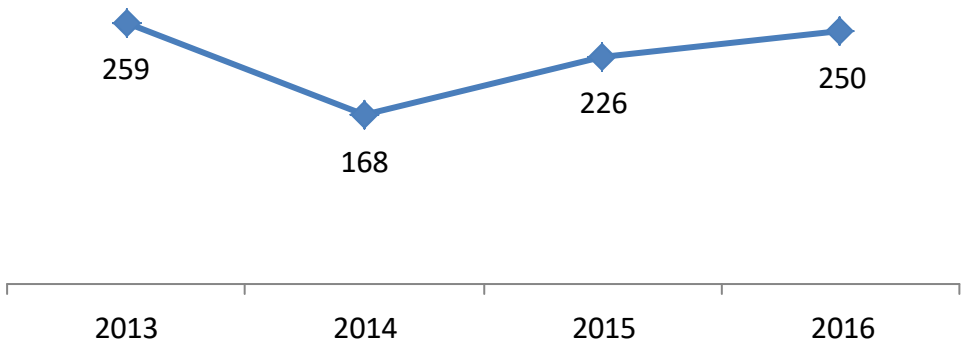

Sumber : Laporan Semester Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Banten, 2015, data diolah

Hal tersebut disebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang adanya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota., sehingga hal ini berbanding lurus dengan rendahnya pengaduan/pelaporan atas tindak kekerasan di Provinsi Banten. Hal ini mengakibatkan data dan fakta tentang terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dideteksi.

Adapun peningkatan upaya pelayanan masyarakat melalui perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu Sudah tersedianya ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian di Unit PPA Polres dan Subdit I Renata Polda Banten ; Sudah tersedianya aparat / Unit PPA sampai ke tingkat Polsek di wilayah Hukum Polda Banten, tenaga kesehatan Mampu Tata Laksana Ktp dan KtA , pekerja sosial, dan pembimbing rohani; dan Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban melalui fasilitasi P2TP2A Provinsi Banten dan P2T2A Kab/Kota bekerjasama dengan Polda Banten dan Lemabaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tabel. 2.3
Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Banten
Tahun 2012 - 2016

L/P	2012	2013	2014	2015	2016	**Jumlah**
1	4	5	6	7	8	9
Laki-Laki	76	43	55	274	154	676
Perempuan	386	469	529	549	736	3316
Jumlah	462	512	584	823	890	3992

Sumber : BPPMD Provinsi Banten, data diolah

Dari tabel 2.3 diatas dapat dilihat angka pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan jenis kekerasan yang terjadi berdasarkan laporan dari Unit Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten sebagai berikut :

Grafik 2.8
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Serang

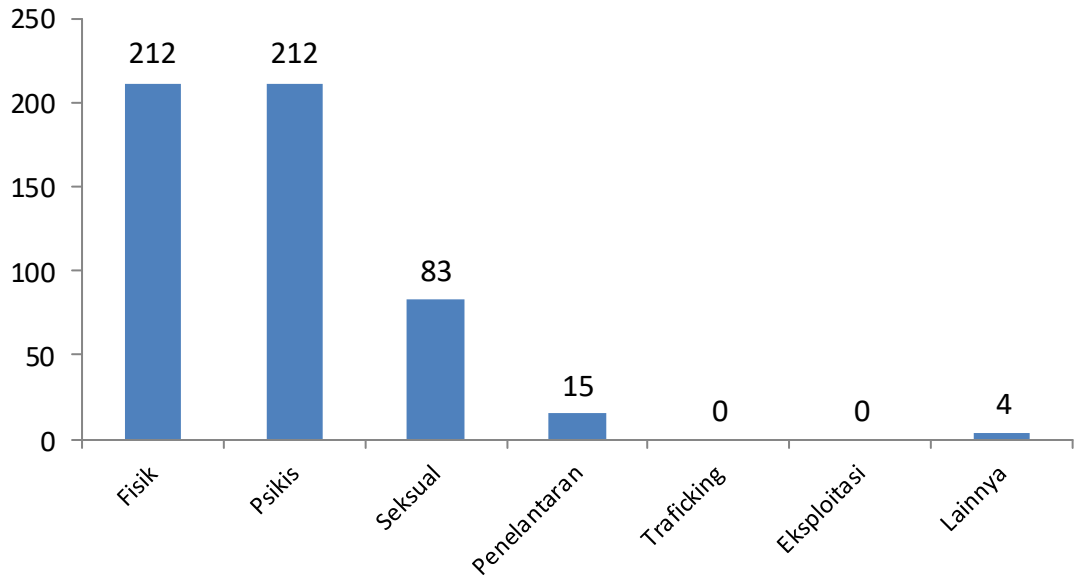

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.9
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Lebak

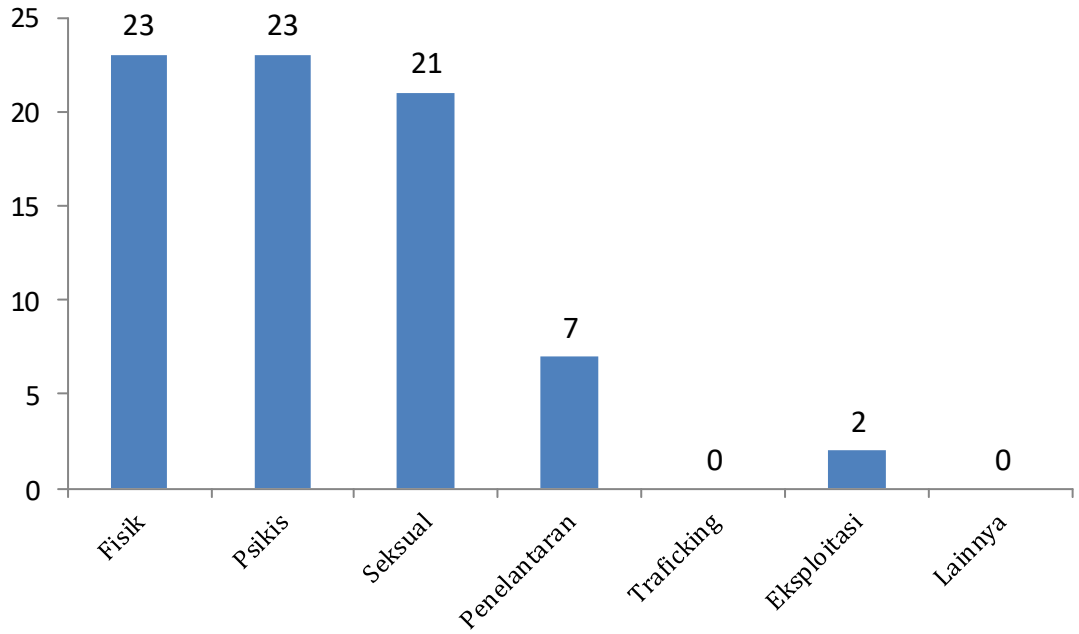

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.10
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Serang

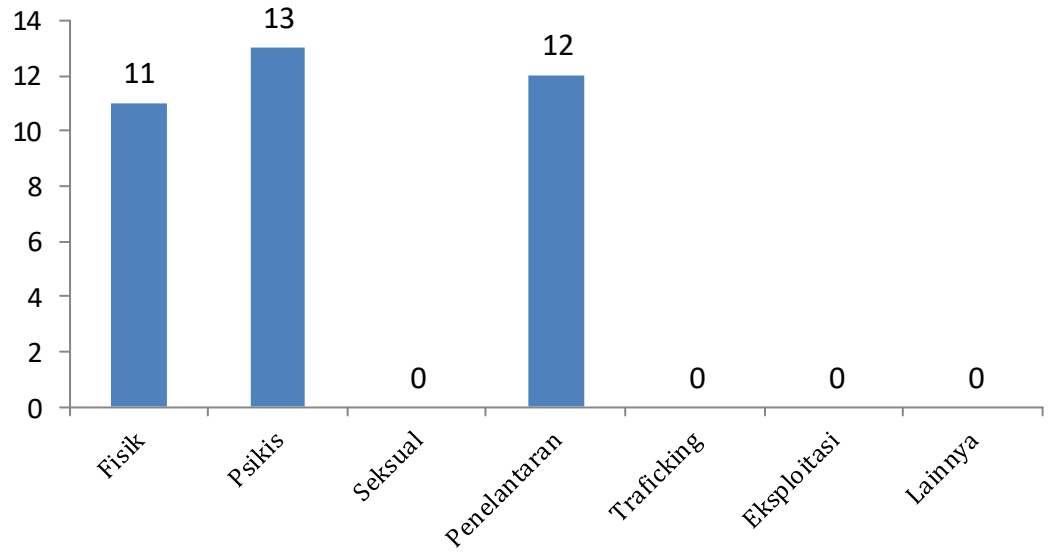

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.11
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Cilegon

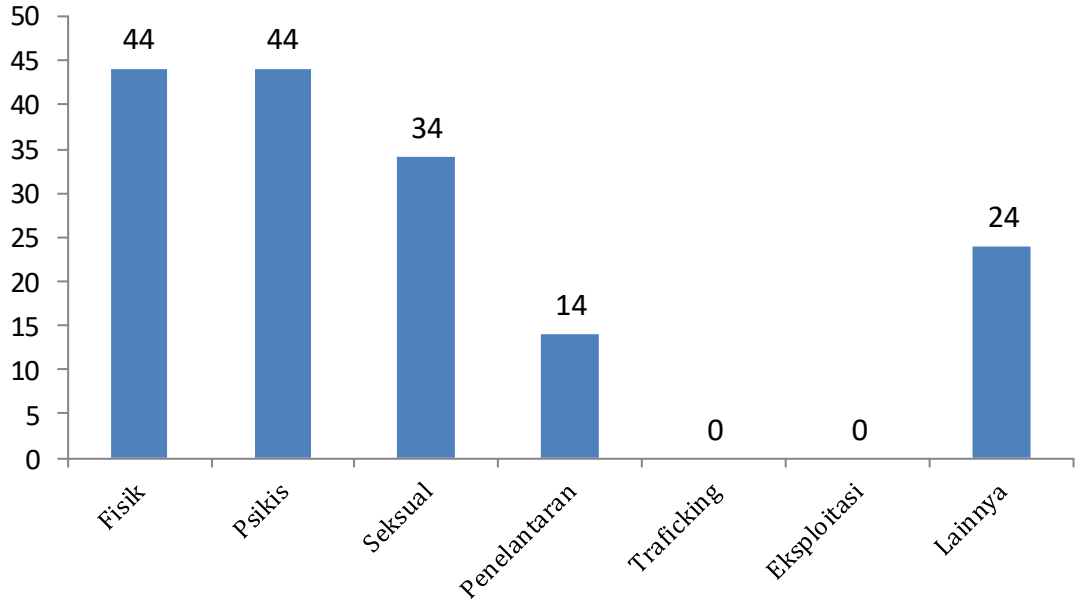

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.12
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Pandeglang

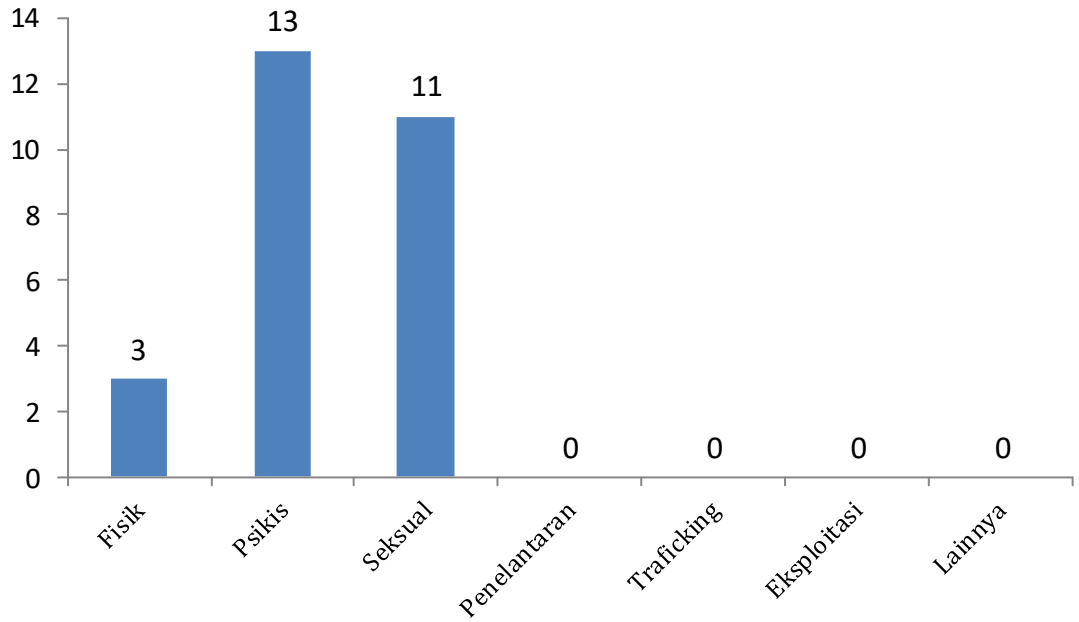

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.13
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Tangerang

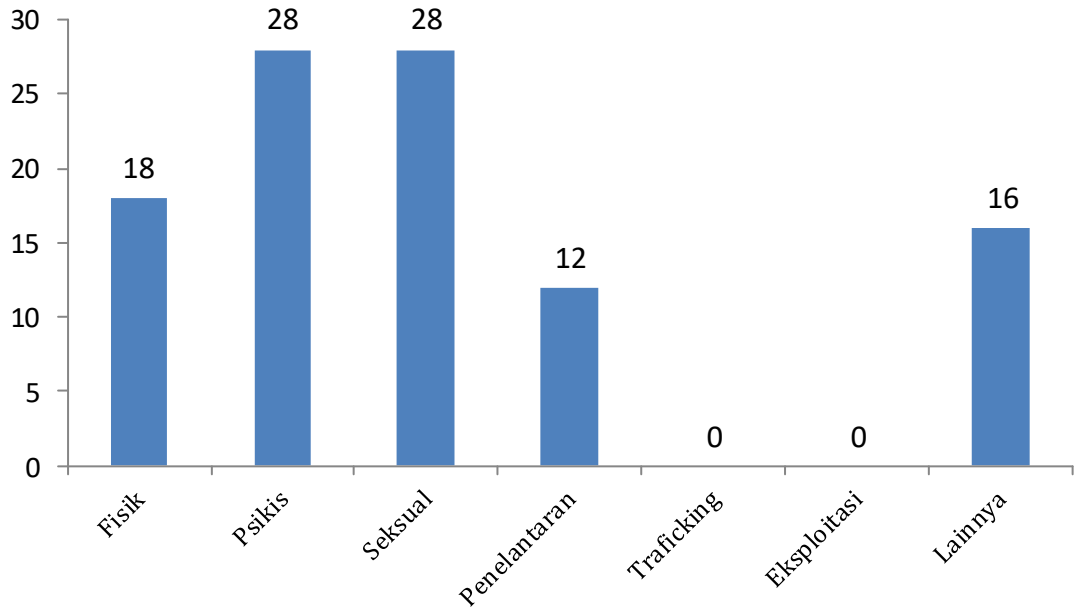

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.14
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Tangerang

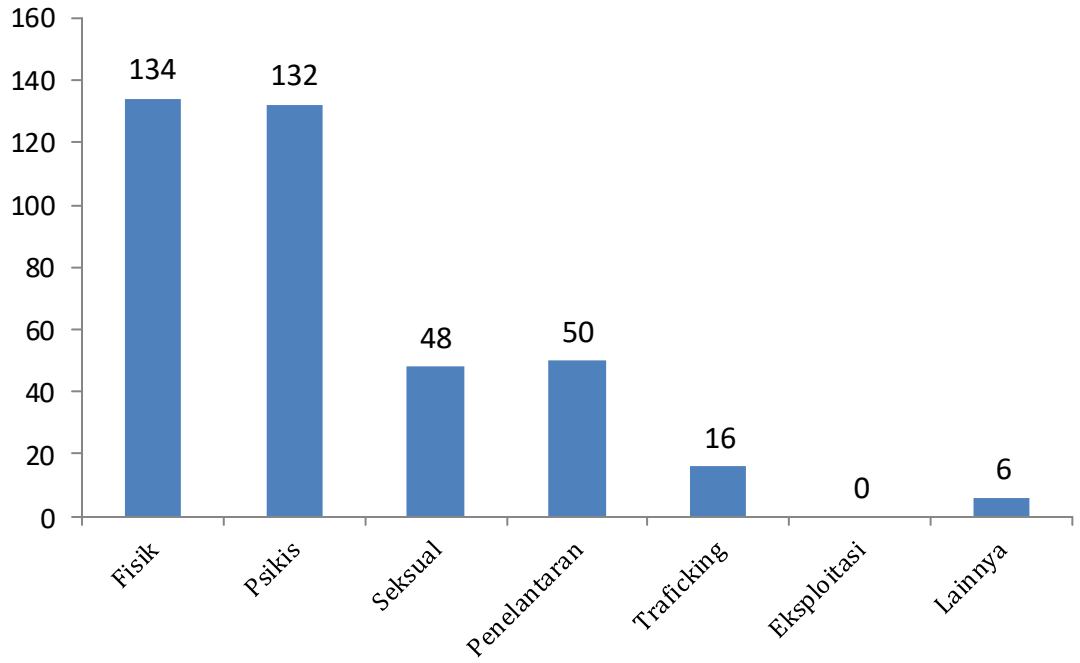

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.15
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Tangerang Selatan

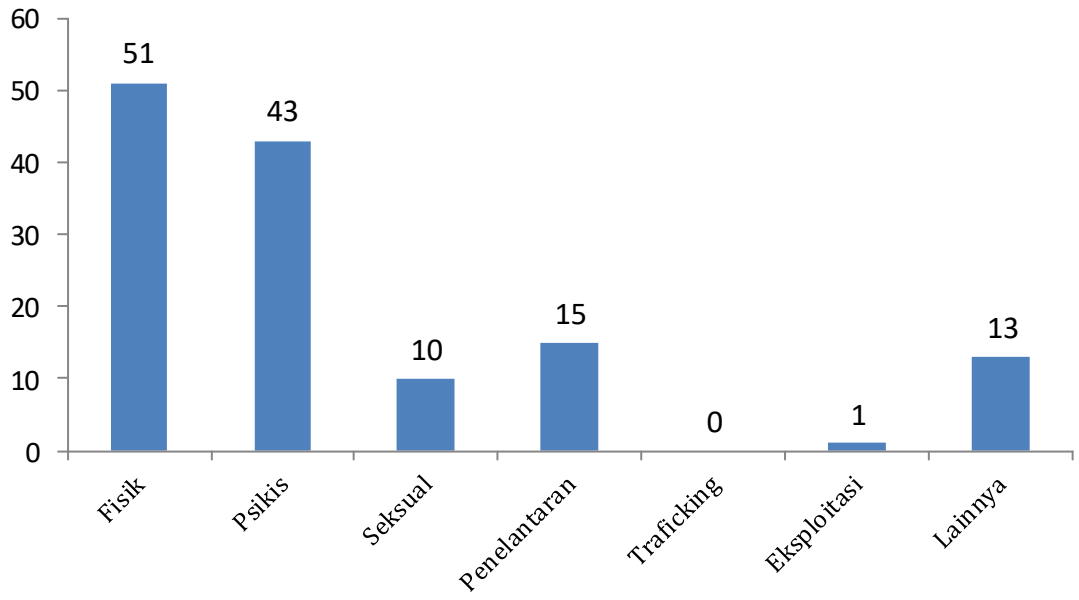

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.16
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tingkat Provinsi Banten

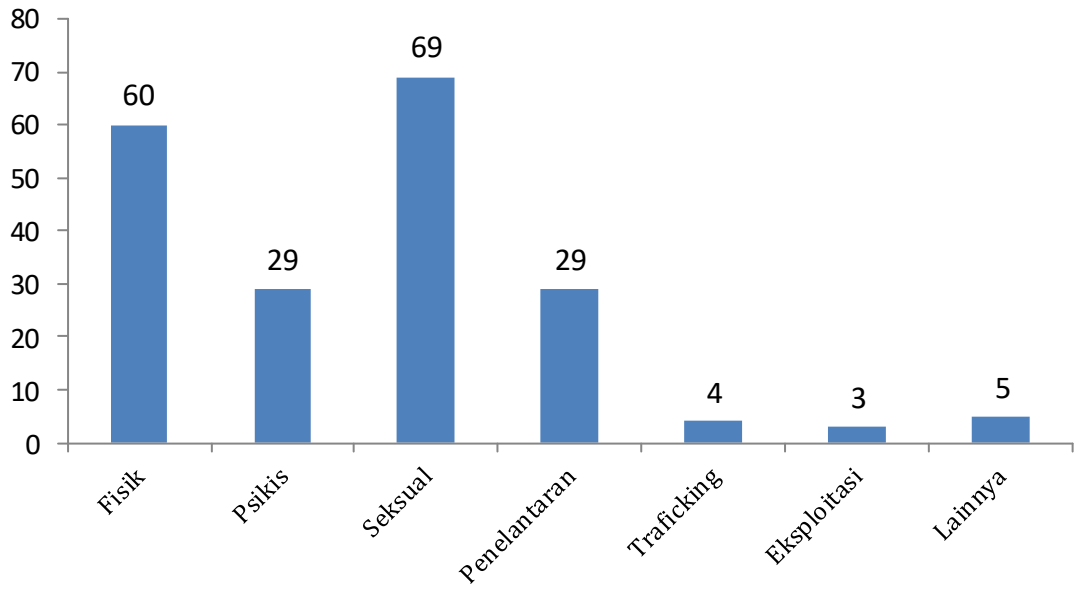

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Dari tabel tersebut diatas, maka dapat dilihat jenis kekerasan yang paling banyak terlaporkan adalah kekerasan fisik yang selalui dibarengi oleh kekerasan psikis/Mental.

3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tentunya memerlukan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam hal tertib administrasi kependudukan adalah menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penduduk sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan.

Periode tahun 2014 tercatat jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.016.587 jiwa yang kemudian mengalami kenaikan sebesar 0.66% pada tahun 2015, namum selanjutnya berdasarkan data sementara BPS akhir tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.161.541 jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut, berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan dapat tergambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.17
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el

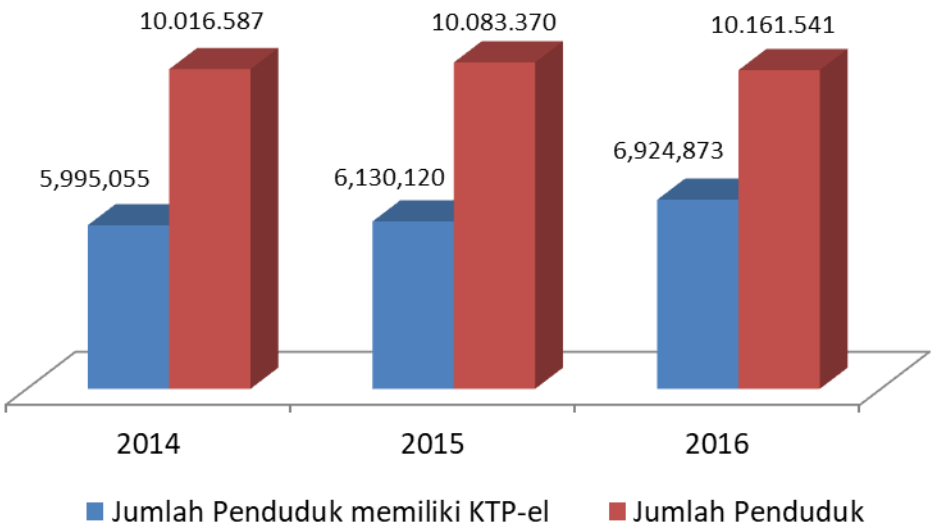

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.18
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

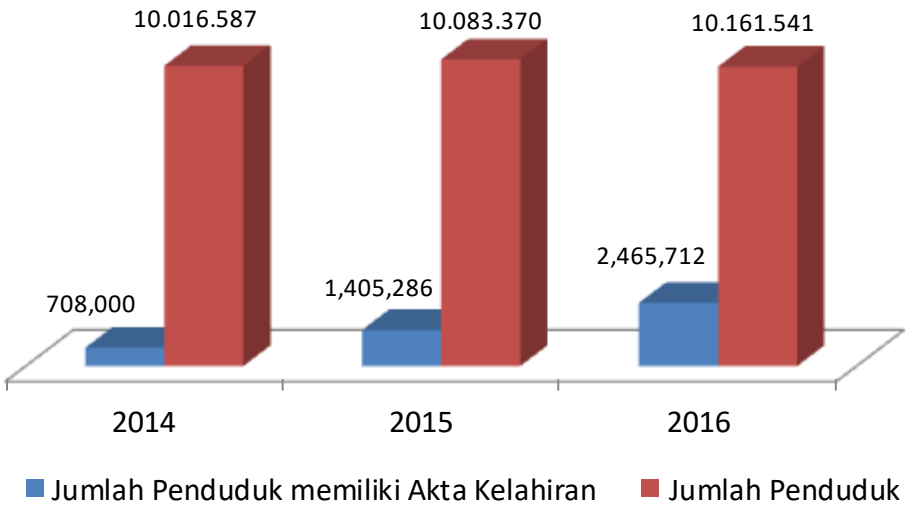

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.19
Jumlah Penduduk yang Belum Kawin

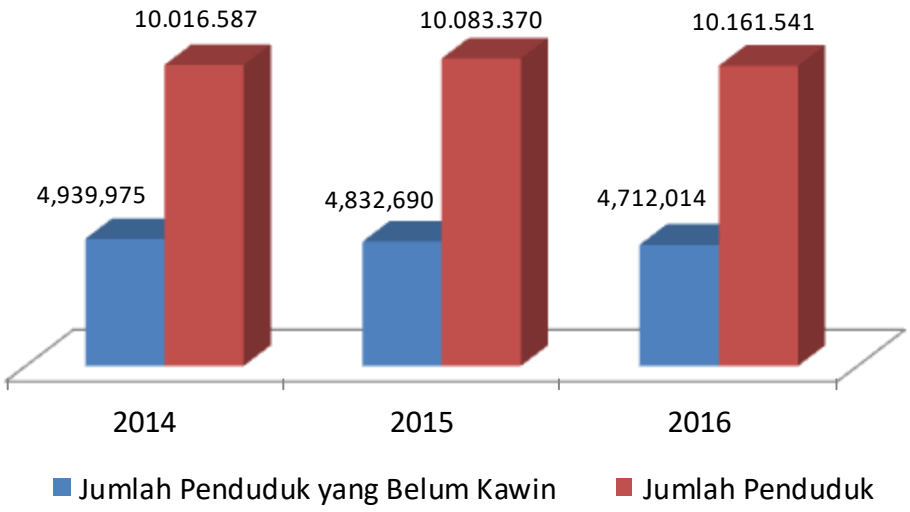

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.20
Jumlah Penduduk yang Sudah Kawin

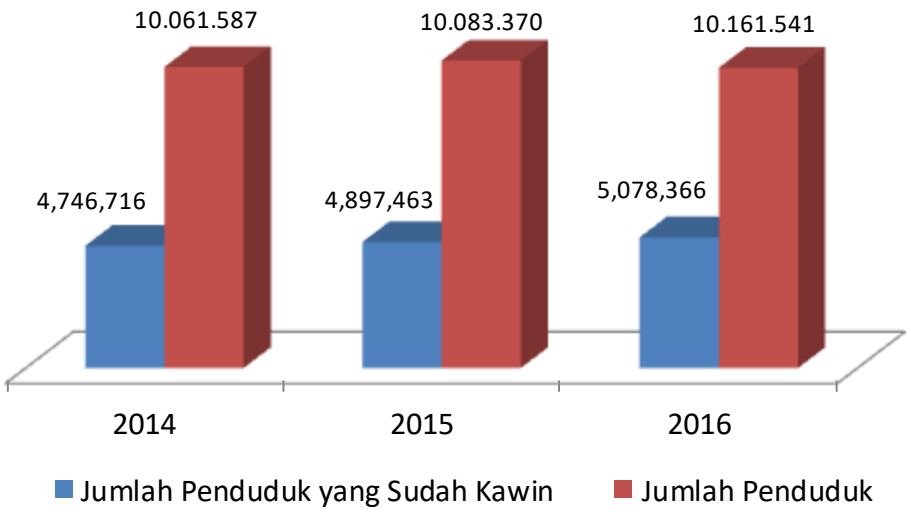

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.21
Jumlah Penduduk yang Cerai Mati

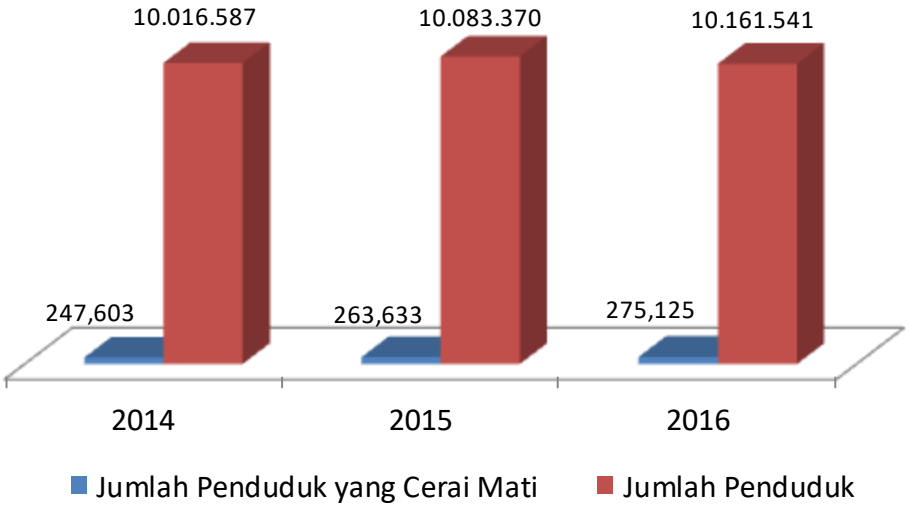

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.22
Jumlah Penduduk yang Cerai Hidup

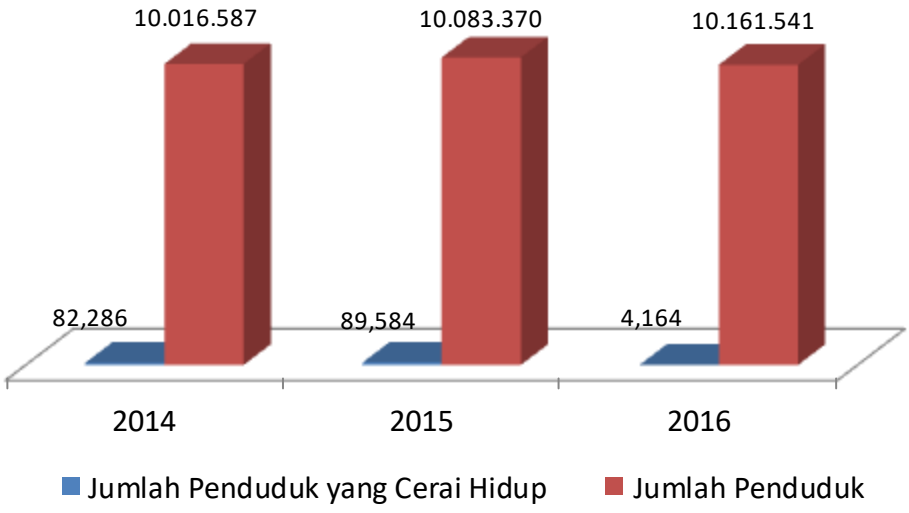

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.23
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

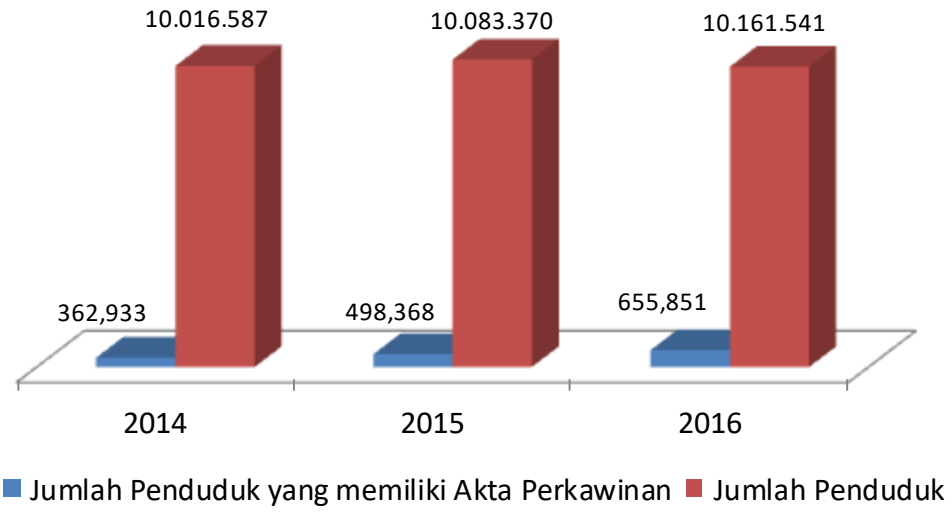

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan Keluarga Berencana periode tahun 2012-2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten berorientasi kepada Peningkatan Integrasi Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kapasitas PPKBD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :

A. Isu Internasional

1. Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Anak (KTT Anak) di New York, 30 September 1990
2. Deklarasi Stochklom untuk Agenda Aksi menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak tahun 1996
3. Keberlanjutan MDG's melalui SDG's

B. Isu Nasional

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
4. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak
5. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
7. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013
8. komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
9. Tingginya Angka kelahiran
10. Perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang responsif gender
11. Mengurangi kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga

C. Isu Regional

1. Belum optimalnya partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
2. Belum optimalnya Pendapatan Perempuan dalam Keluarga
3. Masih Rendahnya Kualitas Keluarga
4. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum optimal
5. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FKPK2PA)
6. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Lansia
7. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Disabilitas
8. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Korban Bencana
9. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD

10. Penguatan P2TP2A
11. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal point
12. Penguatan sistem data gender dan anak
13. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota
15. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak
16. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
17. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
18. Fasilitasi Sekolah Khusus Anak (SKh)
19. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak
20. Optimalisasi Forum Kader POSYANDU
21. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
23. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
24. Belum optimalnya Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;
4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan serta peluang dan kekuatan, meliputi :

a. Tantangan

1. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan.;
2. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan konflik peran;
3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;
4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja;
5. Meningkatkan kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana;
6. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;
7. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;
8. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib *data base* kependudukan, dan tertib dokumen kependudukan

b. Hambatan

1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor belum optimal;
2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana.

c. Peluang

1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;
2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;
3. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;
4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
5. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;

6. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga Berencana;
7. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;

d. Kekuatan

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya dikelompokan ke dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup;
2. Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak
3. Pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga)
4. Kepemilikan dokumen kependudukan
5. Tata Kelola Pemerintahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan berpijak pada kebijakan pemerintah provinsi secara umum yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang teknis operasional perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2018 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui tema Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 **"MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN"** dengan perencanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2018.

Tema rancangan RKPD Tahun 2018 dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2018 meliputi :

1. Pembangunan Aksesibilitas, Mutu Dan Relevansi Pendidikan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masayarakat dalam Layanan pendidikan Menengah (Infrastruktur, bantuan Biaya Pendidkan, Peningkatan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, rekrutmen)
   b. Pendidikan berkebutuhan khusus
   c. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan menengah
2. Pembangunan Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masayarakat dalam Layanan kesehatan (Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan tenaga Medis dan paramedis)
   b. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
   c. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif
   d. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi Dan Air Baku dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Penanganan Perhubungan Darat dan pelayaran
   b. Infrastruktur jalan dan dan jembatan
   c. Infrastruktur daerah irigasi permukiman dan perumahan;
   d. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
   e. Perkuatan Infrastuktur Desa Miskin dan Tertinggal
   f. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten
   g. Pemenuhan elektrifikasi
   h. Pengendalian Bidang Pertambangan
4. Pembangunan Ekonomi Lokal dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
   b. Peningkatan Akses pembiayaan dan akses pasar
   c. Pengembangan Ekonomi kreatif dan Koperasi

d. Meningkatkan dukungan infrastruktur Produksi dan Distribusi barang dan Jasa dan Promosi

5. Pembangunan Pertanian dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Intensifikasi pertanian melalui pengembangan bibit unggul (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan)
   b. Meningkatkan dukungan Prasarana dan Sarana disentra produksi pangan
   c. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
   d. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pangan dan Pangan Lainnya
   e. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
   f. meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
   g. Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
   h. Penguatan Kelembagaan Petani
6. Pelestarian Seni, Budaya Dan Pembangunan Kepemudaan Dan Pariwisata dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
   b. Pelestarian kebudayaan
   c. Promosi dan Pengembangan Destinasi wisata
   d. Pengembangan kompetensi SDM dan Kelembagaan pariwisata
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga Dan Kependudukan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Pengendalian Penduduk melalui program keluarga berencana
   b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
8. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
   b. Pengurangan Beban Penduduk Miskin
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung dan hutan rakyat
   b. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional
   c. Penanganan bencana longsor dan banjir

10. Meningkatkan Kinerja Aparatur Serta Tata Kelola Pemerintahan Dengan Penerapan Iptek dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
    a. Peningkatan profesionalisme aparatur
    b. Penelitian dan implementasi hasil penelitian
    c. Kerjasama pendanaan dan program pembangunan
    d. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;
    e. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    f. Penerapan E-Government
    g. Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi

Sebagai pengejawantahan Tema Rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2018, maka ditetapkan pula tema Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2018, berupa **"PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG BAIK"** yang difokuskan kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Keluarga Berencana
3. Peningkatan pembinaan administrasi kependudukan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Banten

Secara umum substansi sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Banten Tahun 2018 telah mempedomani kepada pencapaian sasaran dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2018, sebagaimana terlampir pada Tabel 2.24 terlampir

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2018

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Tata Kelola Pemerintahan**				**4,874,908,700**	**Tata Kelola Pemerintahan**				**4,874,608,700**
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	**Provinsi Banten**			**21,800,000**	**Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**Provinsi Banten**			**21,800,000**
			Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan		16,510,000			Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan		16,510,000
			Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		460,000			Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		460,000
			Penyusunan Dokumen Laporan Pajak		4,830,000			Penyusunan Dokumen Laporan Pajak		4,830,000
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	**Provinsi Banten**			**122,485,800**	**Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	**Provinsi Banten**			**122,485,800**
			Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan		15,328,800			Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan		15,328,800
			Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan		99,991,000			Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan		99,991,000
			Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian		6,256,000			Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian		6,256,000
			Monitoring dan Evaluasi		910,000			Monitoring dan Evaluasi		910,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	**Provinsi Banten**			**1,000,000,000**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**Provinsi Banten**			**1,000,000,000**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		1,000,000,000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		1,000,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	**Provinsi Banten**			**547,198,000**	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**Provinsi Banten**			**546,898,000**
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		523,898,000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		523,898,000
			Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		23,300,000			Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		23,000,000
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	**Provinsi Banten**			**2,166,850,700**	**Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran**	**Provinsi Banten**			**2,166,850,700**
			Operasional Kantor Tidak Tetap		174,600,000			Operasional Kantor Tidak Tetap		174,600,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyediaan Barang Habis Pakai		836,222,700			Penyediaan Barang Habis Pakai		836,222,700
			Penyediaan Bahan Cetak		139,897,000			Penyediaan Bahan Cetak		139,897,000
			Penyediaan Makan dan Minum Kantor		1,016,131,000			Penyediaan Makan dan Minum Kantor		1,016,131,000
	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	**Provinsi Banten**			**748,926,000**	**Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah**	**Provinsi Banten**			**748,926,000**
			Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		510,206,000			Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		510,206,000
			Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		238,720,000			Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		238,720,000
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	**Provinsi Banten**			**85,302,000**	**Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**Provinsi Banten**			**85,302,000**
			Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		3,900,000			Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		3,900,000
			Peningkatan Komptensi Aparatur		81,402,000			Peningkatan Komptensi Aparatur		81,402,000
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	**Provinsi Banten**			**109,875,000**	**Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan**	**Provinsi Banten**			**109,875,000**
			Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD		70,715,000			Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD		70,715,000
			Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD		39,160,000			Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD		39,160,000
	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	**Provinsi Banten**			**72,471,200**	**Penyediaan Data Pembangunan Sektoral**	**Provinsi Banten**			**72,471,200**
			Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah		9,216,000			Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah		9,216,000
			Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah		50,771,200			Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah		50,771,200
			Pengelolaan Website Perangkat Daerah		1,620,000			Pengelolaan Website Perangkat Daerah		1,620,000
			Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik		10,270,000			Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik		10,270,000
			Pengelolaan PPID		594,000			Pengelolaan PPID		594,000
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**2,108,192,300**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**2,108,192,300**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Optimalisasi Perencanaan dan Penyediaan Data Gender Dan Anak	**Provinsi Banten**			**272,240,500**	**Optimalisasi Perencanaan dan Penyediaan Data Gender Dan Anak**	**Provinsi Banten**			**272,240,500**
			Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten		51,880,000			Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten		51,880,000
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersana PPRG		28,068,000			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersana PPRG		28,068,000
			Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota		37,365,000			Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota		37,365,000
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021		74,773,500			Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021		74,773,500
			Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten		32,180,000			Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten		32,180,000
			Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya oleh Pemerintah		47,974,000			-		47,974,000
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	**Provinsi Banten**			**1,339,164,800**	**Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	**Provinsi Banten**			**1,339,164,800**
			Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten		79,878,100			Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten		79,878,100

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten		263,907,500			Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten		263,907,500
			Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)		887,488,800			Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)		887,488,800
			Bimbingan teknis pengelolaan industri rumahan bagi perempuan		107,890,400			Bimbingan teknis pengelolaan industri rumahan bagi perempuan		107,890,400
	Peningkatan Kualitas Keluarga	**Provinsi Banten**			**496,787,000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Provinsi Banten**			**496,787,000**
			Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten		153,042,000			Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten		153,042,000
			Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah		91,585,000			Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah		91,585,000
			Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)		252,160,000			Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)		252,160,000
	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				**1,812,495,000**	**Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**				**1,812,495,000**
	Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	**Provinsi Banten**			**972,477,000**	**Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Provinsi Banten**			**972,477,000**
			Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial		41,600,000			Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial		41,600,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan		100,170,000			Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan		100,170,000
			Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan		38,240,000			Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan		38,240,000
			Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas		38,240,000			Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas		38,240,000
			Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		38,250,000			Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		38,250,000
			Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah		221,820,000			Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah		221,820,000
			Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan melalui publikasi media		51,625,000			Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan melalui publikasi media		51,625,000
			Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi		42,532,000			Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi		42,532,000
			Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus		400,000,000			Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus		400,000,000
	Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak	**Provinsi Banten**			**440,018,000**	**Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak**	**Provinsi Banten**			**440,018,000**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat provinsi dan kabupaten/kota		54,978,000			Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat provinsi dan kabupaten/kota		54,978,000
			Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)		134,800,000			Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)		134,800,000
			Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten		146,340,000			Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten		146,340,000
			Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi		43,800,000			Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi		43,800,000
			Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		60,100,000			Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		60,100,000
	Perlindungan Khusus Terhadap Anak	**Provinsi Banten**			**400,000,000**	**Perlindungan Khusus Terhadap Anak**	**Provinsi Banten**			**400,000,000**
			Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak		36,410,000			Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak		36,410,000
			Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten		33,420,000			Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten		33,420,000
			Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		330,170,000			Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)		330,170,000
3	**Kependudukan dan Keluarga Berencana**				**1,394,515,000**	**Kependudukan dan Keluarga Berencana**				**1,394,515,000**
	Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Provinsi Banten**			**295,000,000**	**Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Provinsi Banten**			**295,000,000**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		75,000,000			Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		75,000,000
			Pemetaan penduduk migrasi di Provinsi Banten tahun 2017		75,000,000			Pemetaan penduduk migrasi di Provinsi Banten tahun 2017		75,000,000
			Bimbingan teknis pemetaan penduduk Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		70,000,000			Bimbingan teknis pemetaan penduduk Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		70,000,000
			Supervisi penyelenggaraan pengendalian penduduk tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		75,000,000			Supervisi penyelenggaraan pengendalian penduduk tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten		75,000,000
	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana	**Provinsi Banten**			**395,515,000**	**Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana**	**Provinsi Banten**			**395,515,000**
			Diseminasi kesehatan reproduksi remaja bagi Pelajar SLTA dan sederajat		236,520,000			Diseminasi kesehatan reproduksi remaja bagi Pelajar SLTA dan sederajat		236,520,000
			Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi		46,985,000			Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi		46,985,000
			Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		40,185,000			Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		40,185,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		71,825,000			Pengadaan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		71,825,000
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Sejahtera	**Provinsi Banten**			**704,000,000**	**Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Sejahtera**	**Provinsi Banten**			**704,000,000**
			Peningkatan progam keluarga sejahtera melalui Penjaringan Pelayanan KB bagi masyarakat di daerah Tertinggal dan Perbatasan		125,500,000			Peningkatan progam keluarga sejahtera melalui Penjaringan Pelayanan KB bagi masyarakat di daerah Tertinggal dan Perbatasan		125,500,000
			Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Remaja (KBKR) di daerah Kepulauan (Pulau Tunda, Pulau Sangiang dan Pulau Panjang)		74,000,000			Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Remaja (KBKR) di daerah Kepulauan (Pulau Tunda, Pulau Sangiang dan Pulau Panjang)		74,000,000
			Bimbingan Teknis Manajerial Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)		92,000,000			Bimbingan Teknis Manajerial Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)		92,000,000
			Diseminasi Penjaringan Program KB bagi Bintara Pembina Desa (BABINSA)		79,500,000			Diseminasi Penjaringan Program KB bagi Bintara Pembina Desa (BABINSA)		79,500,000
			Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja		333,000,000			Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja		333,000,000
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				**561,489,000**	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				**828,972,500**
	Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan	**Provinsi Banten**			**153,008,000**	**Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan**	**Provinsi Banten**			**196,472,500**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El		46,501,000			Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El		39,688,500
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk		33,044,000			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk		43,548,000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Keluar Negeri		23,317,000			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Keluar Negeri		30,000,000
			Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten		23,128,500			Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten		43,548,000
			Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan		27,017,500			Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan		39,688,000
	Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil	**Provinsi Banten**			**113,438,000**	**Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil**	**Provinsi Banten**			**150,000,000**
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk		90,416,000			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk		75,000,000
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan		23,022,000			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan		75,000,000
	Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil	**Provinsi Banten**			**295,043,000**	**Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil**	**Provinsi Banten**			**482,500,000**
			Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan		11,118,000			Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan		150,000,000
			Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan		33,704,500			Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan		50,000,000
			Bimbingan Teknis Administrator Database SIAK		37,461,000			Bimbingan Teknis Administrator Database SIAK		67,500,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan		33,992,500			Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan		50,000,000
			Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK		65,700,000			Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK		30,000,000
			Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		45,000,000			Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		45,000,000
			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		65,700,000			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan		40,000,000
			Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan		2,367,000			Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan		50,000,000
						Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)	**Provinsi Banten**			**970,658,000**
								Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota		412,943,600
								Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota		34,000,000
								Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk		122,657,700
								Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)		122,657,700
								Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota		46,424,000
								Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota		29,015,000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk		202,960,000
						Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	**Provinsi Banten**			**129,331,000**
								Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota		55,905,700
								Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil		73,425,300
						Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	**Provinsi Banten**			**333,288,600**
								Bimbingan Teknis PIAK		122,657,700
								Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		73,321,200
								Penyusunan Profil Kpeendudukan Tingkat Provinsi		32,804,600
								Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi		45,897,050
								Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi		58,608,050

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

CATATAN PENTING
12

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam menyusun rencana program kegiatan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yang terkait dan diformulasikan kedalam usulan program kegiatan. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme komunikasi dan ditindaklanjuti melalui verifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Dari usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, terdapat program kegiatan yang telah diakomodir ke dalam program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Namun demikian terdapat usulan program kegiatan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme Bantuan Keuangan dan Hibah.

Usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan sebagaimana terlampir pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2018

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA TERKAIT	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil	Data dan Informasi	Kota Serang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang	6 Unit	90,000,000	Motor Pelayanan Keliling
					1 Unit	150,000,000	Mobil Pelayanan Keliling
					30 Unit	450,000,000	Card Reader
			Kabupaten Serang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang	1 Unit	150,000,000	Mobil Pelayanan Keliling
					10 Unit	100,000,000	Komputer
					5 Unit	12,500,000	Printer Dot Matrix
					32 Unit	480,000,000	Card Reader
			Kabupaten Lebak	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak	3 Unit	450,000,000	Mobil Pelayanan Adminduk
					3 Unit	150,000,000	Motor Trail
					2 Unit	30,000,000	Motor Matic
					7 Unit	70,000,000	Laptop
					9 Unit	540,000,000	Printer Laser Jet
					30 Unit	300,000,000	PC Client
					10 Unit	164,140,000	Alat Perlengkapan Biometric
			Kota Cilegon	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon	20 Unit	188,000,000	Iris Mata
					20 Unit	12,280,000	Scanner Sidik Jari
					10 Unit	4,000,000	Signature Pad
					11 Unit	66,000,000	Camera DSLR
					20 Unit	200,000,000	Komputer
					53 Unit	795,000,000	Card Reader
					1 Unit	7,550,000	Printer Dot Matrix Large
					13 Unit	26,000,000	Printer
					2 Unit	80,000,000	PC Server
			Kabupaten Tangerang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang	2 Unit	18,800,000	Iris Mata
					2 Unit	1,228,000	Scanner Sidik Jari
					2 Unit	800,000	Signature Pad
					2 Unit	12,000,000	Camera DSLR
					2 Unit	30,000,000	Card Reader
			Kabupaten Pandeglang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang	2 Unit	18,800,000	Iris Mata
					2 Unit	1,228,000	Scanner Sidik Jari
					2 Unit	800,000	Signature Pad
					2 Unit	12,000,000	Camera DSLR
					2 Unit	30,000,000	Card Reader
			Kota Tangerang	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang	2 Unit	18,800,000	Iris Mata
					2 Unit	1,228,000	Scanner Sidik Jari
					2 Unit	800,000	Signature Pad
					2 Unit	12,000,000	Camera DSLR
					2 Unit	30,000,000	Card Reader
			Kota Tangerang Selatan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan	2 Unit	18,800,000	Iris Mata
					2 Unit	1,228,000	Scanner Sidik Jari
					2 Unit	800,000	Signature Pad
					2 Unit	12,000,000	Camera DSLR
					2 Unit	30,000,000	Card Reader

NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS PROVINSI	LOKASI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA TERKAIT	VOLUME	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
II	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A**						
	Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Kualitas Hidup Perempuan	Kabupaten Tangerang	Dinas P3A Kabupaten Tangerang	1 kegiatan	-	Fasilitasi P2WKSS
					1 kegiatan	-	Pemberian Insentif bagi Relawan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kabupaten Lebak	Dinas P2KBP3A Kabupaten Lebak	4 kali	185,000,000	Gerakan Sayang Ibu (GSI)
					1 kali	250,000,000	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan
					1 kali	100,000,000	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
					9 forum	-	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di bidang teknologi
			Kota Tangerang Selatan	Dinas PM3AKB Kota Tangerang Selatan	150 orang	250,000,000	Pendidikan dan pelatihan peran serta kesetaraan gender bagi perempuan untuk keterwakilan di legislatif/politik
	Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak	Kualitas Hidup Anak	Kabupaten Tangerang	Dinas P3A Kabupaten Tangerang	29 Kecamatan	-	Sosialisasi Kecamatan Layak Anak
	Kegiatan Optimalisasi Penyediaan Data Gender Dan Anak	Sistem Data Gender dan Anak	Kota Tangerang Selatan	Dinas PM3AKB Kota Tangerang Selatan	1 paket	280,000,000	Pemutakhiran data terpilah gender
III	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana						
	Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Keluarga Berencana	Kabupaten Serang	Dinas KBP3A Kabupaten Serang	29 Kecamatan	1,000,000,000	Operasional kampung KB
					326 Kecamatan	3,260,000,000	Pengadaan alat bantu penyuluhan (ABP)
			Kota Tangerang	Dinas P3AP2KB Kota Tangerang	13 Kecamatan	260,000,000	Kampung KB
					13 Kecamatan		Billboard KIE
			Kabupaten Tangerang	Bappeda Kabupaten Tangerang	29 Kecamatan	580,000,000	Fasilitasi Kampung KB
					29 Kecamatan	580,000,000	Penguatan ketahanan remaja melalui pembinaan PIKR di SLTP dan SLTA
			Kabupaten Lebak	Dinas P2KBP3A Kabupaten Lebak	173 orang	150,000,000	Orientasi program KB Nasional bagi petugas lapangan dan PPKBD
			Kota Tangerang Selatan	Dinas PM3AKB Kota Tangerang Selatan	1 paket	103,500,000	Pembinaan keluarga berencana
	Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemetaan Penduduk	Kabupaten Lebak	Dinas P2KBP3A Kabupaten Lebak	1 dokumen	-	Perencanaan pengendalian penduduk
					1 dokumen	-	Analisis dampak kependudukan
					JUMLAH	**11,765,282,000**	

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah :

a. Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi bagian dan subbag Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018;
c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kedalam rencana Program kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bagian dan subbag di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peningkatan dan pemantapan tata kelola pemerintahan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, maka program dan kegiatan prioritas tahun 2018 sebagai berikut :

A. Program Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang difokuskan kepada :
      a. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
      b. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi
      c. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
   2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang difokuskan kepada :
      a. Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan
      b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
      c. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
      d. Monitoring dan Evaluasi
   3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor yang difokuskan kepada Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
   4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang difokuskan kepada :
      a. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
      b. Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB
   5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang difokuskan kepada :
      a. Operasional Kantor Tidak Tetap
      b. Penyediaan Barang Habis Pakai
      c. Penyediaan Bahan Cetak
      d. Penyediaan Makan dan Minum Kantor
   6. Peningkatan Kapasitas Aparatur yang difokuskan kepada :
      a. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian
      b. Peningkatan Komptensi Aparatur

7. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah yang difokuskan kepada :
   a. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
   b. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
8. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang difokuskan kepada :
   a. Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD
   b. Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
9. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral yang difokuskan kepada :
   a. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah
   b. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah
   c. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
   d. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik
   e. Pengelolaan PPID
   f. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

B. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan melalui Kegiatan :
1. Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak yang difokuskan kepada :
   a. Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten
   b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersana PPRG
   c. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
   d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021
   e. Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten
   f. Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Oleh Pemerintah
2. Peningkatan kualitas hidup perempuan yang difokuskan kepada :
   a. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten
   b. Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten
   c. Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial

d. Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
e. Bimbingan teknis pengelolaan industri rumahan bagi perempuan

3. Peningkatan kualitas keluarga yang difokuskan kepada :
   a. Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten
   b. Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
   c. Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)

C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang difokuskan kepada :
   a. Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial
   b. Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan
   c. Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan
   d. Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas
   e. Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
   f. Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah
   g. Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan melalui publikasi media
   h. Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi
   i. Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus
2. Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak yang difokuskan kepada :
   a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat provinsi dan kabupaten/kota
   b. Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)

c. Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten
d. Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi
e. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Perlindungan khusus terhadap anak yang difokuskan kepada :
   a. Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
   b. Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten
   c. Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

D. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk yang difokuskan kepada :
   a. Bimbingan Teknis Pemetaan Penduduk Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
   b. Pemetaan penduduk migrasi di Provinsi Banten tahun 2017
   c. Supervisi penyelenggaraan pengendalian penduduk tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
   d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
2. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana yang difokuskan kepada :
   a. Diseminasi kesehatan reproduksi remaja bagi Pelajar SLTA dan sederajat
   b. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi
   c. Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota
   d. Pengadaan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga sejahtera yang difokuskan kepada :
   a. Peningkatan progam keluarga sejahtera melalui Penjaringan Pelayanan KB bagi masyarakat di daerah Tertinggal dan Perbatasan

b. Bimbingan Teknis Manajerial Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
c. Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Remaja (KBKR) di daerah Kepulauan (Pulau Tunda, Pulau Sangiang dan Pulau Panjang)
d. Diseminasi Penjaringan Program KB bagi Bintara Pembina Desa (BABINSA)

E. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui Kegiatan :

1) Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan yang difokuskan kepada :
   a. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El
   b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk
   c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Keluar Negeri
   d. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten
   e. Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan
2) Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi pencatatan sipil yang difokuskan kepada :
   a. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk
   b. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan
3) Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catan sipil yang difokuskan kepada :
   a. Bimbingan Teknis Administrator Database SIAK
   b. Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK
   c. Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
   d. Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan
   e. Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan
   f. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
   g. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan

4) Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) yang difokuskan kepada :
   a. Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk
   b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota
   c. Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk
   d. Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)
   e. Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota
   f. Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota
   g. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk
5) Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK) yang difokuskan kepada :
   a. Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota
   b. Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil
6) Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) yang difokuskan kepada :
   a. Bimbingan Teknis PIAK
   b. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
   c. Penyusunan Profil Kpendudukan Tingkat Provinsi
   d. Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi
   e. Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi

Rincian program dan kegiatan beserta pendanaan sebagaimana tabel 3.1 terlampir

Tabel 3.1
Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA				**25,261,877,600**				**32,806,271,700**
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				**13,077,000,000**	DAU			**13,077,000,000**
	BELANJA LANGSUNG				**12,184,877,600**				**19,729,271,700**
	Urusan Wajib Non Dasar				**12,184,877,600**				**19,729,271,700**
1202	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**8,795,596,000**				**16,314,971,700**
1202.01	**Program Tata Kelola Pemerintahan**	**Nilai IKM**		**Skala 2.80**	**4,874,908,700**			**Skala 3.00**	**4,628,576,700**
1202.120201.01.001	**Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**		**20.00%**	**21,800,000**			**20.00%**	**115,000,000**
		Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	Provinsi Banten	17 dokumen	16,510,000	PAD		17 dokumen	
		Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi	Provinsi Banten	2 dokumen	460,000	PAD		2 dokumen	
		Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	Provinsi Banten	3 dokumen	4,830,000	PAD		3 dokumen	
1202.120201.01.002	**Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	**Tersusunnya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja OPD**		**20.00%**	**122,485,800**			**17.00%**	**156,000,000**
		Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	Provinsi Banten	3 dokumen	15,328,800	PAD		3 dokumen	
		Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Provinsi Banten	9 dokumen	99,991,000	PAD		9 dokumen	
		Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	Provinsi Banten	5 dokumen	6,256,000	PAD		5 dokumen	
		Monitoring dan Evaluasi	Provinsi Banten	4 dokumen	910,000	PAD		4 dokumen	
1202.120201.01.003	**Pengadaan Sarana Prasarana Kantor**	**Tersedianya sarana prasarana kantor**		**18.00%**	**1,000,000,000**			**11.00%**	**400,000,000**
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Provinsi Banten	68 unit	1,000,000,000	PAD		30 unit	
1202.120201.01.004	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor**		**20.00%**	**547,198,000**			**8.00%**	**633,100,000**
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Provinsi Banten	20 Unit/12 bulan	523,898,000	PAD		30 Unit/12 bulan	
		Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK						200 unit	
		Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	Provinsi Banten	20 unit / bulan	23,300,000	PAD		20 unit	
1202.120201.01.005	**Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran**	**Tersedianya barang dan jasa kantor**		**22.00%**	**2,166,850,700**			**22.00%**	**2,166,850,700**
		Operasional Kantor Tidak Tetap	Provinsi Banten	27 orang / bulan	174,600,000	PAD		27 orang / bulan	
		Penyediaan Barang Habis Pakai	Provinsi Banten	12 Bulan	836,222,700	PAD		12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Bahan Cetak	Provinsi Banten	12 Bulan	139,897,000	PAD		12 bulan	
		Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Provinsi Banten	12 Bulan	1,016,131,000	PAD		12 bulan	
		Penyediaan Operasional Jasa Kantor						12 bulan	
		Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo						2 paket	
		Penyediaan BBM						12 bulan	
1202.120201.01.006	**Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Tupoksi**		**20.00%**	**85,302,000**			**20.00%**	**140,000,000**
		Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Provinsi Banten	15 dokumen	3,900,000	PAD		15 dokumen	
		Peningkatan Komptensi Aparatur	Provinsi Banten	3 kegiatan	81,402,000	PAD		3 kegiatan	
1202.120201.01.007	**Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah**	**Tersedianya Dukungan Pembiayaan Koordinasi dan Konsutasi OPD**		**20.00%**	**748,926,000**			**20.00%**	**748,926,000**
		Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Provinsi Banten	12 Bulan	510,206,000	PAD		12 bulan	
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Provinsi Banten	12 Bulan	238,720,000	PAD		12 bulan	
1202.120201.01.008	**Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan**	**Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan OPD**		**20.00%**	**109,875,000**			**20.00%**	**43,700,000**
		Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD	Provinsi Banten	12 Bulan	70,715,000	PAD		12 bulan	
		Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	Provinsi Banten	12 Bulan	39,160,000	PAD		12 bulan	
1202.120201.01.009	**Penyediaan Data Pembangunan Sektoral**	**Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Sektoral OPD**		**20.00%**	**72,471,200**			**19.00%**	**225,000,000**
		Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	Provinsi Banten	2 dokumen	9,216,000	PAD		2 dokumen	
		Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	Provinsi Banten	1 dokumen	50,771,200	PAD		1 dokumen	
		Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Provinsi Banten	1 tahun	1,620,000	PAD		1 dokumen	
		Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	Provinsi Banten	2 dokumen	10,270,000	PAD		2 dokumen	
		Pengelolaan PPID	Provinsi Banten	1 tahun	594,000	PAD		1 dokumen	
		Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat						1 dokumen	
1202.15	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera**				**2,108,192,300**				**7,771,500,000**
		Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak		**0.10%**				**63.33%**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupa Perencanaan Responsif Gender		**20.00%**				**55.00%**	
		Rasio Partisipasi Perempuan di Lembaga legislatif, swasta dan pemerintah		**99.90%**				**62.27%**	
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memilik Lembaga Sadar Gender		**83.59%**				**75.00%**	
		Indeks Ketahanan Keluarga		**0.94%**				**67.62%**	
1202.120201.15.001	**Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak**	**Terlaksananya peningkatan perencanaan pengarusutamaan gender**		**13.00%**	**272,240,500**			**29.00%**	**697,974,000**
		Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	1 dokumen	37,365,000	PAD		1 dokumen	
		Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dokumen	51,880,000	PAD			
		Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Oleh Pemerintah	Provinsi Banten	1 dokumen	47,974,000	PAD		1 dokumen	
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat	Provinsi Banten	1 dokumen	28,068,000	PAD		1 dokumen	
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021	Provinsi Banten	1 dokumen	74,773,500	PAD			
		Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	Provinsi Banten	2 dokumen	32,180,000	PAD		2 dokumen	
		Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten						1 dokumen	
		Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota						100 orang	
		Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan						50 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten						1 dokumen	
		Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota						70 orang	
1202.120201.15.002	**Peningkatan kualitas hidup perempuan**	**Terlaksananya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan politik**		**17.00%**	**1,339,164,800**			**22.00%**	**1,818,631,000**
		Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	Provinsi Banten	2 dokumen	79,878,100	PAD		2 dokumen	
		Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	2 dokumen	263,907,500	PAD		2 dokumen	
		Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial						200 orang	
		Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	Provinsi Banten	11 lembaga	887,488,800	PAD		4 lembaga	
		Bimbingan teknis pengelolaan industri rumahan bagi perempuan	Provinsi Banten	160 orang	107,890,400	PAD			
		Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan						100 orang	
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten						1 dokumen	
		Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten						1 kegiatan	
		Evaluasi Model Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)						1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan Model Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)						2 kegiatan	
1202.120201.15.003	**Peningkatan kualitas keluarga**	**Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga**		**12.74%**	**496,787,000**				**1,340,000,000**
		Pembentukan Karakter Anak melalui Keluarga						60 orang	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 kegiatan	153,042,000	PAD		1 kegiatan	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Provinsi Banten	1 kegiatan	91,585,000	PAD		1 kegiatan	
		Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Provinsi Banten	1 kegiatan	252,160,000	PAD		1 kegiatan	
		Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten						1 dokumen	
		Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga						250 orang	
		Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS						160 orang	
		Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal						90 orang	
		Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah						100 orang	
		Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten						30 orang	
1202.15	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**				**1,812,495,000**				**3,914,895,000**
		Cakupan Penyelesaian Pengaduan KDRT		**75.00%**				**95%**	
		Cakupan Penyeesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak		**75.00%**				**95%**	
		Rasio Perlindungan Khusus Anak		**75.00%**				**63.33%**	
1202.120201.15.004	**Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**		**20.00%**	**972,477,000**			**20.00%**	**1,659,895,000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial	Provinsi Banten	50 organisasi	41,600,000	PAD		50 organisasi	
		Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan	Provinsi Banten	50 perusahaan	100,170,000	PAD		50 perusahaan	
		Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan	Provinsi Banten	50 organisasi	38,240,000	PAD		50 organisasi	
		Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas	Provinsi Banten	50 organisasi	38,240,000	PAD		50 organisasi	
		Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Provinsi Banten	2 dokumen	38,250,000	PAD		2 dokumen	
		Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah	Provinsi Banten	500 orang	221,820,000	PAD		200 orang	
		Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan melalui publikasi media	Provinsi Banten	1 kegiatan	51,625,000	PAD			
		Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	60 orang	42,532,000	PAD		60 orang	
		Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus	Provinsi Banten	1 kegiatan	400,000,000	PAD		1 kegiatan	
		Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten						100 orang	
1202.120201.15.005	**Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak**	**Terselenggaranya peningkatan pemenuhan hak anak melalui perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak**		**18.00%**	**440,018,000**			**20.00%**	**1,450,000,000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Provinsi Banten	2 dokumen	54,978,000	PAD		2 dokumen	
		Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)	Provinsi Banten	800 orang	134,800,000	PAD		95 orang	
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	500 orang	146,340,000	PAD		500 orang	
		Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	1 dokumen	43,800,000	PAD		1 dokumen	
		Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Provinsi Banten	100 orang	60,100,000	PAD		120 orang	
		Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren						60 orang	
		Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Asrama dan Panti Asuhan						60 orang	
		Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas						60 orang	
		Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu						200 orang	
		Peningkatan kapasitas anak dalam pengembangan seni budaya daerah						70 orang	
		Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu						1 dokumen	
1202.120201.15.006	**Perlindungan khusus terhadap anak**	**Terlaksanaya perlindungan khusus bagi ABK, ABH dan Kebutuhan Khusus Lainnya**		**16.00%**	**400,000,000**			**21.00%**	**805,000,000**
		Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Provinsi Banten	50 orang	36,410,000	PAD		50 orang	
		Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dokumen	33,420,000	PAD		1 dokumen	
		Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Provinsi Banten	50 lembaga	330,170,000	PAD		50 lembaga	
		Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)						50 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat						50 kelompok	
		Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH)						50 orang	
		Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat						100 orang	
		Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota						80 orang	
		Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok Masyarakat						50 kelompok	
1206	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**1,994,766,600**				**897,600,000**
1206.15	**Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				**1,994,766,600**				**897,600,000**
		Rasio Bayi Berakte Kelahiran		**64.86%**				**67.38%**	
		Rsio Pasangan Berakte Nikah		**23.33%**				**30.81%**	
		Rasio Kepemilikan KTP-el dan NIK		**85.76%**				**86.47%**	
		Rasio Kepemilikan Akat Kelahiran per 1000 penduduk		**79.19%**				**80.99%**	
		Cakupan Data dan Informasi Kependudukan		**85.00%**				**100%**	
1206.120201.15.001	**Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan**	**Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**		**20.00%**	**153,008,000**			**20.00%**	**224,000,000**
		Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El	Provinsi Banten	1 dokumen	46,501,000	PAD		1 dokumen	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	Provinsi Banten	32 orang	33,044,000	PAD		32 orang	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Keluar Negeri	Provinsi Banten	32 orang	23,317,000	PAD		32 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dokumen	23,128,500	PAD		1 dokumen	
		Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	Provinsi Banten	1 dokumen	27,017,500	PAD		1 dokumen	
		Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan						1 kegiatan	
1206.120201.15.002	**Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi pencatatan sipil**	**Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil**		**16.00%**	**113,438,000**			**21.00%**	**240,000,000**
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk	Provinsi Banten	32 orang	90,416,000	PAD		32 orang	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan	Provinsi Banten	32 orang	23,022,000	PAD		32 orang	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perceraian dan Pembatalan Perceraian						32 orang	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak						32 orang	
		Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan						1 kegiatan	
1206.120201.15.003	**Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**Terlaksannaya Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan**		**20.00%**	**295,043,000**			**21.00%**	**433,600,000**
		Bimbingan Teknis Administrator Databse SIAK	Provinsi Banten	1 paket	37,461,000	PAD			
		Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK	Provinsi Banten	260 buku	65,700,000	PAD			
		Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	45 orang	45,000,000	PAD		1 dokumen	
		Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Provinsi Banten	1 dokumen	65,700,000	PAD			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan	Provinsi Banten	1 paket	11,118,000			1 paket	
		Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Provinsi Banten	260 buku	33,704,500			260 buku	
		Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK						45 orang	
		Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan	Provinsi Banten	45 orang	33,992,500			45 orang	
		Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK						1 dokumen	
		Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan						1 dokumen	
		Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan	Provinsi Banten	1 dokumen	2,367,000			1 dokumen	
1206.120201.15.004	**Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)**	**Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota**		**20.00%**	**970,658,000**			**20.00%**	**-**
		Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk	Provinsi Banten	3 kegiatan	412,943,600	DAK		3 kegiatan	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	1 dokumen	34,000,000	DAK		1 dokumen	
		Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Provinsi Banten	187 orang	122,657,700	DAK		187 orang	
		Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)	Provinsi Banten	187 orang	122,657,700	DAK		187 orang	
		Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	1 dokumen	46,424,000	DAK		1 dokumen	
		Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	1 dokumen	29,015,000	DAK		1 dokumen	
		Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk	Provinsi Banten	3 kegiatan	202,960,000	DAK		3 kegiatan	
1206.120201.15.005	**Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)**	**Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota**		**20.00%**	**129,331,000**			**20.00%**	**-**
		Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota	Provinsi Banten	2 dokumen	55,905,700	DAK		2 dokumen	
		Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Provinsi Banten	32 orang	73,425,300	DAK		32 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1206.120201.15.006	**Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)**	**Terlaksananya pembinaan pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota**		**20.00%**	**333,288,600**			**20.00%**	**-**
		Bimbingan Teknis PIAK	Provinsi Banten	187 orang	122,657,700	DAK		187 orang	
		Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Provinsi Banten	32 orang	73,321,200	DAK		32 orang	
		Penyusunan Profil Kpendudukan Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	1 dokumen	32,804,600	DAK		1 dokumen	
		Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	2 dokumen	45,897,050	DAK		2 dokumen	
		Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	1 kegiatan	58,608,050	DAK		1 kegiatan	
1208	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**1,394,515,000**				**2,516,700,000**
1208.15	**Program Kependudukan dan Keluarga Berencana**				**1,394,515,000**				**2,516,700,000**
		Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)		**2.33%**				**2.29%**	
		Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)		**60.90%**				**61.00%**	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		**10.26%**				**10.18%**	
		Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)		**2.53%**				**25.18%**	
1208.120201.15.001	**Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk**	**Terselenggaranya pemetaan dan pengendalian penduduk**		**14.00%**	**295,000,000**			**21.00%**	**549,000,000**
		Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2017						1 dokumen	
		Bimbingan teknis pemetaan penduduk Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	100 orang	70,000,000	PAD		171 orang	
		Pengembangan Pendidikan Kependudukan						1 kegiatan	
		Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk						1 dokumen	
		Pemetaan penduduk migrasi di Provinsi Banten tahun 2017	Provinsi Banten	1 dokumen	75,000,000	PAD		1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Supervisi penyelenggaraan pengendalian penduduk tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dokumen	75,000,000	PAD		1 dokumen	
		Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	1 dokumen	75,000,000	PAD		1 dokumen	
1208.120201.15.002	**Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana**	**Terlaksananya Peningkatan Informasi Keluarga Berencana Bagi Masyarakat**		**19.00%**	**395,515,000**			**17.00%**	**640,000,000**
		Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE)						50 orang	
		Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi	Provinsi Banten	1 dokumen	46,985,000	PAD			
		Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Provinsi Banten	80 orang	40,185,000	PAD		50 orang	
		Pengadaan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Provinsi Banten	1 kegiatan	71,825,000	PAD			
		Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program KKBPK						1 kegiatan	
		Diseminasi pencegahan HIV/AIDS ataupun Napza bagi pelajar SLTA dan sederajat						50 orang	
		Diseminasi kesehatan reproduksi remaja bagi Pelajar SLTA dan sederajat	Provinsi Banten	480 orang	236,520,000	PAD			
		Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)						50 orang	
		Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB						80 orang	
		Advokasi Keluarga Berencana Lintas Program dan Lintas Sektor						100 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)						80 orang	
1208.120201.15.003	**Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana**	**Terlaksananya Peningkatan pelayanan keluarga sejahtera**		**22.00%**	**704,000,000**			**21.00%**	**1,327,700,000**
		Peningkatan progam keluarga sejahtera melalui Penjaringan Pelayanan KB bagi masyarakat di daerah Tertinggal dan Perbatasan	Provinsi Banten	600 orang	125,500,000	PAD		80 orang	
		Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Remaja (KBKR) di daerah Kepulauan (Pulau Tunda, Pulau Sangiang dan Pulau Panjang)	Provinsi Banten	1 kegiatan	74,000,000	PAD		1 kegiatan	
		Bimbingan Teknis Manajerial Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Provinsi Banten	400 orang	92,000,000	PAD		80 orang	
		Pembinan Ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera						80 orang	
		Diseminasi Penjaringan Program KB bagi Bintara Pembina Desa (BABINSA)	Provinsi Banten	120 orang	79,500,000	PAD			
		Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten						200 orang	
		Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten						200 orang	
		Peningkatan program konseling KB dalam penggunaan alat kontrasepsi bagi paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik						80 orang	
		Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan						80 orang	
		Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB						80 orang	
		Pengembangan Program Kampung KB se-Provinsi Banten						80 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Tolok Ukur	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	Provinsi Banten	640 orang	333,000,000	PAD		300 orang	
		Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Koalisi Muda Kependudukan						80 orang	

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Sekretariat
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian PEP
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian PEP
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Pengarusutamaan Gender

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga
Bidang Perlindungan Perepuan dan Anak
Seksi Perlindungan Perempuan

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Pemenuhan Hak Anak

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Perlindungan Khusus Anak

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Seksi Pembinaan Kependudukan

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil
Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Pembinaan Kependudukan
Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana

UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGAJWAB
11

BAB 4

PENUTUP

BAB 4 PENUTUP

Dengan adanya Renja SKPD Tahun 2018, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Gedung SKPD Terpadu
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang
website : www.dp3akkb.bantenprov.go.id